

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Literature Review

Literature Review atau disebut dengan tinjauan pustaka adalah salah satu bagian dari skripsi. Fungsinya adalah sebagai salah satu fondasi dalam argumentasi, mencari *research gap* agar terhindar dari plagiarisme, mencari perbedaan dari metodologi dan isu, tema yang diangkat, memperkuat analisis dan kritis bagi penulis. Dengan kata lain *literature review* berfungsi sebagai pembanding untuk melihat penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan skripsi yang akan ingin diteliti. Penulis memetakan pelbagai literatur yang dijadikan rujukan terkait skripsi yang akan diteliti melalui tabel berikut di bawah ini:

No.	Tahun penulisan, Nama penulis, judul, dan jenis penelitian	Arah penelitian	Keunggulan	Kekurangan
1.	2012, Murad F. Alhalayqah, DINAMIKA PERSENJATAAN ANGKATAN LAUT CHINA (Tesis)	- menganalisis dinamika pada peningkatan armada PLAN China dengan unit analisis pada pada PLAN (<i>People's Liberation Army Navy</i>); - mendeskripsikan <i>military build up</i>	- Menjelaskan <i>Blue Water Navy China</i> yang ditulis secara historis dari tiap rezim China (Mao Zedong-Hu Jintao sebagai bahan rujukan yang akan diteliti oleh penulis.	- Lebih condong menjelaskan pada analisis PLA China secara domestik yang dipengaruhi oleh faktor- faktor ekonomi dan

		<p>yang dibangun oleh China pada alutsista dan armada angkatan laut China sejak rezim Deng Xiaoping, kepentingan China dalam meningkatkan kekuatan armada PLA ke arah kekuatan maritim</p> <ul style="list-style-type: none"> - menggunakan metode penelitian Kuantitatif;berbasis pada statistika yang diolah melalui tabel dan grafik yang menjelaskan jenis-jenis salutsista dan armada PLA China - Unit analisis pada PLA China 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan faktor-faktor yang ditulis secara historis dan doktrin pertahanan dari PLA China yang menyebabkan China berupaya untuk menjadikan sebagai <i>big power</i>. - Menjelaskan periodisasi peningkatan modernisasi dan <i>military build up</i> yang dibangun tiap pemimpin China terutama pada peningkatan teknologi militer <i>Revolutionary Military Affairs</i> (RMA) - Menjelaskan kepentingan China dalam upaya <i>sea power</i> dengan mencapai <i>Blue Water Navy</i> yang dilakukan 	<p>politik dalam modernisasi militer China</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Blue Water Navy</i> sebagai tujuan yang dicapai oleh China sehingga penekanan Militer China sebatas pada periodisasi dari tiap rejim sampai Hu Jintao - Tidak menjelaskan pengaruh dari peningkatan modernisasi militer yang dilakukan oleh China terhadap ancaman Taiwan pada <i>Cross Strait Relations</i> meskipun menjelaskan Taiwan
--	--	---	---	---

			oleh China sebagai kekuatan maritim di bidang militer	sebagai faktor mengapa China meningkatkan kekuatan militernya - kerangka teoritis yang lebih mendetail sesuai dengan sistematika analisis penelitian jenjang S2
2.	2015, Mariesta Yulien Anggraeny, PENINGKATAN KEKUATAN MARITIM CINA DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEAMANAN MARITIM DI ASIA TENGGARA (Skripsi)	<ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan kepentingan nasional China dalam meningkatkan kekuatan maritim pada PLAN China untuk meningkatkan pengaruh geopolitik dan geostrategi dalam kepentingan perdagangan jalur maritim - Mendeksripsikan pengaruh peningkatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan gambaran geopolitik China dalam memperluas kekuatan maritim pada PLAN China dengan tujuan untuk mencapai <i>Blue Water Navy</i> sebagai rujukan yang akan diteliti oleh penulis - Mendeskripsikan struktur kekuatan maritim China 	<ul style="list-style-type: none"> - Dari sisi subtnasi lebih condong menjelaskan variabel ekonomi dalam sektor jalur perdagangan maritim (geoekonomi) sebagai kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh China di Selat Malaka

		<p>kekuatan maritim yang dilakukan oleh China pada PLAN yang berpengaruh pada ancaman Kawasan pada Asia Tenggara dan <i>spillover</i> pada peningkatan kekuatan militer India dalam mengamankan <i>Sea Lines of Communication</i> (SLOC) salah satunya pada Selat Malaka</p> <p>- Metode penelitian kualitatif berbasis pada deksriptif dalam menjelaskan upaya yang dilakukan negara-negara Asia tenggara dalam meningkatkan kekuatan maritim pada Selat Malaka dan historis menjelaskan latar belakang</p>	<p>dengan mendeksripsikan jenis-jenis alutsista dan armada pada PLAN China</p> <p>- Analisisnya menjelaskan pengaruh yang ditimbulkan dari upaya peningkatan armada laut China terhadap <i>security diilema</i> pada Kawasan Asia Tenggara yang berimplikasi pada India yang memiliki kepentingan pada SLOC</p> <p>- Mengelaborasi dengan landasan Politik International dan <i>Seapower</i> (Premis mayor) serta SLOC (Premis Minor) sebagai rujukan yang akan</p>	<p>- Tidak menjelaskan secara spesifik rezim yang memerintah kekuatan maritim PLAN China dalam periode tersebut</p> <p>- Dari sisi variabel yang akan dianalisis focus pada Kawasan Asia Tenggara</p> <p>- Sisi teoritis tidak menganalisis secara spesifik akar landasan kepentingan nasional China pada PLAN yang dipengaruhi oleh Kebijakan Luar Negeri terutama <i>Chinese Dream</i> yang</p>
--	--	--	---	---

		<p>kepentingan China di Kawasan Asia Tenggara dalam melindungi SLOC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unit analisis pada Keamanan Maritim Asia Tenggara 	diteliti oleh penulis	<p>akan menjadi masalah, dan diteliti sebagai akar <i>Blue Water Navy</i> China, serta tidak menjelaskan secara spesifik pengaruhnya terhadap keamanan teritori neagra tetangganya Taiwan terutama pada <i>Cross Strait Relations</i></p>
3.	<p>2017, Moch. Muhathir, PERAN <i>DEMOCRATIC PROGRESSIVE PARTY (DPP) DAN KUOMINTANG (KMT) TERHADAP KEBIJAKAN LUAR NEGERI TAIWAN: (ANALISA KEBIJAKAN CROSS-STRAIT</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi dan mendeksirpsikan peran Partai Politik Taiwan yang berkuasa antara lain Kuomintang (KMT) dan <i>Democratice Progressive Party</i> terhadap hubungan antar selat (<i>Cross Strait Relations</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian menjelaskan secara rinci <i>Cross Strait Relations</i> antara Taiwan dengan China sebagai rujukan yang akan diteliti oleh penulis - Menjelaskan landasan Kebijakan LN Taiwan tiap rejim yang akan 	<ul style="list-style-type: none"> - Hanya menjelaskan <i>inward looking</i> dengan melihat sisi pengaruh <i>bureaucratic approach</i> pada variabel eksplanasi tanpa melihat pengaruh sistemik

	<p>RELATIONS TAIWAN DENGAN TIONGKOK (Skripsi)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan perbandingan pengaruh partai Kuomintang dan DPP dalam kebijakan Luar Taiwan pada hubungan antar selat pada China - Menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis eksplanatif dengan meneliti kausalitas peran DPP dan KMT memengaruhi Kebijakan LN Taiwan pada <i>Cross Strait Relations</i> 	<ul style="list-style-type: none"> mempermudah penulis sebagai referensi dalam pengutipan pada skripsi - Menjelaskan teori Analisis Politik Luar Negeri 	<ul style="list-style-type: none"> terutama China yang akan diteliti oleh penulis - Dari sisi teoritis menggunakan pendekatan Konstruktivisme yang berlainan dengan skripsi yang akan menggunakan pendekatan realisme
4.	<p>2018, Sahistya Dhanesworo dan Fahlesa Wisa Fahru Munabahari, DAMPAK ARMS MILITARY BUILD-UP TIONGKOK TERHADAP STABILITAS KEAMANAN</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan pengaruh peningkatan kapabilitas kekuatan militer China terhadap stabilitas keamanan neagra-negara Aliansi Amerika Serikat 	<ul style="list-style-type: none"> - Jurnal ini menjelaskan faktor-faktor mengapa China meningkatkan kekuatan militernya yang dimana <i>Blue Water navy</i> faktor yang diteliti oleh penulis tersebut 	<ul style="list-style-type: none"> - Lebih condong menjelaskan variabel ekonomi dengan menganalisis kepentingan ekonomi AS dalam bisnis senjata dengan aliansinya

	<p>NEGARA-NEGARA ALIANSI AMERIKA SERIKAT DI KAWASAN ASIA PASIFIK PADA PERIODE 2012-2017 (Jurnal Artikel)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menggambarkan <i>military build up</i> yang dibangun oleh China untuk mencapai kekuatan regional di Kawasan Asia Pasifik - Mengidentifikasi kepentingan Amerika Serikat pada peluang pasar senjata yang ditimbulkan dari deterensi neagra aliansi AS (Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan) - Menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis deksriptif analitis dengan menjelaskan upaya kebijakan Aliansi Taiwan dari faktor-faktor pengaruh <i>military build up</i> China - Unit analisis menekankan pada 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan pengaruh <i>Security dilemma</i> China pada <i>military build up</i> terhadap stabilitas keamanan Kawasan Asia Pasifik dengan focus pada aliansi AS, disitu menjelaskan upaya deterensi yang dilakukan oleh Taiwan dengan meningkatkan anggaran pertahanan militer - Sisi teoritis menggunakan teori <i>Detterence</i> sebagai rujukan yang akan diteliti oleh penulis 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak spesifik menjelaskan <i>Cross Strait Relations</i> dan <i>Blue Water Navy China</i> - Tidak menjelaskan periode rezim , melainkan hanya menjelaskan rentang periode tahun
--	---	--	---	--

		negara aliansi AS (Jepang, Korea Selatan, Taiwan)		
5.	2019, Inneke Firsana Dewi dan Karina Utami Dewi, STRATEGI PEMERINTAHAN XI JINPING TERHADAP TAIWAN DALAM MENGAMANKAN KEDAULATAN TIONGKOK (Jurnal Artikel)	<ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan strategi keamanan pada kedaulatan China dalam menekan upaya separatisme yang dilakukan oleh Taiwan dari sisi ekonomi, politik, dan militer - Menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis dekskriptif dengan mengumpulkan data pada kebijakan pada strategi tiongkok terhadap Taiwan 	<ul style="list-style-type: none"> - Jurnal tersebut mengidentifikasi konsep keamanan yang dilakukam oleh tiongkok terutama dalam sector militer, membahas tentang keamanan maritim yang dilkukan oleh PLA - Menjelaskan kepentingan China dalam keamanan militer tiongkok yang nanti akan menjadi ppoint pada pembahasan yang akan diteliti oleh penulis berkaitan dengan kepentingan China pada asuknya PLAN ke teritori Tawian - Menggunakan konnsep Keamanan pada teori 	<ul style="list-style-type: none"> - Hanya menjelaskan secara sederhana upaya yang dilakukan oleh Tiongkok dari pelbagai variabel keamanan berdasarkan teori dari Buzan, keamanan Militer, Politik, dan ekonomi. - Tidak menjelaskan tentang <i>Blue Water Navy</i> dan <i>Cross Starit Relations</i>

			sekuritasi Barry Buzan	
--	--	--	---------------------------	--

Dari kelima *literature review* tersebut penulis menyimpulkan dan mendapatkan *novelty* bahwa. *Pertama* dari rentang waktu dimulai pada tahun 2017- Agustus 2022 dengan fokus pada rezim Xi Jinping dan Tsai Ing Wen. Sisi Variabel bebas atau eksplanasi ingin meneliti landasan *Blue Water Navy* yang dilakukan China di masa Xi yang semakin asertif karena dipengaruhi oleh pemikiran *Chinese Dream* yang dikembangkan pada doktrin strategi militer yang berdasarkan *The Great Rejuvenation of China* bahwa, kepentingan kebijakan Luar Negeri China di masa Xi Jinping karena landasan ideosikretis Xi yang bersifat pragmatis, yaitu langsung terlibat pada kerja nyata atau praktik dalam implementasi kepentingan nasional China dengan kembali pada jati diri sebagaimana China di masa dinasti yang pernah Berjaya, namun dirasionaliasikan ke dalam pemikiran *Chinese Dream*, di mana China berupaya menciptakan kekuatan regional berbasis harmoni dan perdamaian sebagai tujuan nasional China serta upaya kekuatan maritim pada *sea power* China untuk keamanan militer China, reunifikasi Taiwan, dan keamanan ekonomi pada *string of pearls*. Disisi variabel terikat atau analisis penulis menekankan kebaruannya pada pengaruh Dominasi *military power* China pada *Blue Water Navy* melalui PLAN terhadap *Corss strait Relations* yang dimana menyebabkan *Security dilemma* Taiwan di bawah rezim Tsai Ing wen akibat provokasi dari masuknya kapal induk PLAN Liaoning dan Shandong yang terjadi pada 2016 dan terakhir pada tahun 2021 dan masuknya pesawat jet j-16 dan j-10 milik China ke ADIZ Taiwan dan penulis-penulis terdahulu tidak menjelaskan

doktrin pertahanan Taiwan di masa Tsai Ing Wen, yaitu “*Resolute defense, multi domain deterrence*”.

Dengan demikian, dapat disimpulkan kebaharuan yang akan diteliti membahas pengaruh yang telah terjadi akibat dominasi China pada kekuatan Angkatan laut PLAN untuk kepentingan *Blue Water Navy*, menyebabkan terjadi peningkatan *security dilemma* dengan tensi *Cross Strait Relations* yang semakin memburuk dengan studi kasus pada masuknya PLAN ke teritori Taiwan di era Xi Jinping-Tsai Ing wen dari tahun 2017-Agustus 2022) dengan fokus pada doktrin pertahanan “*Resolute Defense, multi domain deterrence*”

2.2 Paradigma Penelitian

Paradigma yang digunakan oleh penulis menggunakan neo-realisme, yaitu dengan unit analisis upaya deterensi Taiwan yang menyebabkan tensi *cross Strait relations* semakin memburuk akibat dominasi China yang ofensif. Neo-realisme adalah salah satu paradigma yang bersumber dari pengembangan realisme klasik atas kritiknya melalui *Second Great Debate*. Kritikan tersebut berisi bahwa perilaku negara tidak hanya dibentuk oleh Hasrat negara sendiri yang berasal dari dalam, tetapi juga dipengaruhi oleh sistem internasional anarki yang memaksa negara untuk *struggle for power* dalam keamanan negaranya. Selain itu juga pendekatan yang cenderung tradisional yang tidak menganggap secara ilmiah bahwa Negara juga memaksimalkan dalam kekuatan *powernya* untuk keamanan diri sendiri dengan peningkatan kapabilitas militer seperti halnya jumlah armada militer, anggaran belanja militer, dan peningkatan kekuatan ekonomi (B. S. Hadiwinata, 2017; Jackson & Sorensen, 2013).

Pemikir neo-realisme salah satunya Kenneth Waltz, dalam bukunya “*theory of International Politics*”. Dari acuan buku tersebut, penulis memberikan poin-poin asumsi-asumsi dari neo-realisme antara lain:

1. Negara melakukan egoisitas karena dipengaruhi oleh sistem internasional yang anarki (*Outside-in*) artinya sistem internasional memengaruhi negara.
2. *Power* bukan sebagai tujuan yaitu dengan cara menghegemoni secara global, tetapi sebagai alat untuk *survival*. Dengan kata lain menjadi superior adalah suatu ketidakbijaksanaan karena akan dihukum oleh sistem internasional seperti yang dilakukan oleh Nazi Jerman dan Kekaisaran Jepang pada tahun 1942.
3. Upaya *Power* digunakan untuk keamanan, sehingga *power* digunakan secara defensif. Dan negara tidak dapat berdiri sendiri seperti halnya realisme klasik yang cenderung *self determination*. Maka dari itu, negara melakukan aliansi dengan negara lain, antara lain: *Balancing*, *Bandwagoning*, atau *hedging*.
4. *Security dilemma bersifat abadi*. Sehingga negara harus berupaya dengan negara lain untuk beraliansi melalui *Balance of power*.
5. Hakikat sistem internasional yang stabil harus bipolar (B. S. (Bob S. Hadiwinata, 2017; Rosyidin, 2020, hal. 33–34; Waltz, 1979).

Dengan demikian dari paradigma di atas yang akan diambil penulis untuk meneliti upaya *self defense* Taiwan yang dipengaruhi oleh sistem internasional (Dominasi China) dalam mengamankan keamanan Nasional Taiwan dan karena *gap* perbandingan kapabilitas militer antara China-Taiwan yang terlalu jauh. Maka Taiwan melakukan aliansi dengan *Balance of power*, salah satunya dengan Kerjasama Latihan militer Taiwan dan AS sehingga terjadi bipolaritas di dalam Kawasan Asia Pasifik antara China dan AS melalui Taiwan sebagai sekutu strategis dalam mencegah dominasi China. Dan China sendiri merasa terancam dengan kehadiran AS yang terlalu mendominasi di Asia Pasifik sehingga terjadi saling melakukan persaingan *power*, salah satunya militer yang saling mendominasi.

Sehingga sebagaimana yang dikatakan oleh Kenneth Waltz bahwa *security dilemma* bersifat abadi.

2.3 Kerangka Teoritis

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan isu yang akan diteliti dengan pelbagai landasan teori yang relevan.

2.3.1 Keamanan

Keamanan adalah ketika tidak adanya suatu ancaman yang ditimbulkan dari manapun, baik dari musuh negara lain ataupun dari non-negara. Berbicara keamanan berarti tidak terlepas dari ancaman yang ditimbulkan dari musuh. Perspektif realisme melihat bahwa hakikat sifat negara yang saling membunuh satu sama lain, mengakibatkan setiap negara berupaya untuk *struggle for power* sebagai *self help* yang dilakukan negara untuk mempertahankan diri dari sistem internasional yang anarki (Williams, 2008). Dalam konsep ilmu Hubungan Internasional (HI). Karena konsep keamanan bersifat luas, maka Keamanan dibagi menjadi dua. Yaitu keamanan tradisional dan keamanan non-tradisional. Keamanan Tradisional adalah keamanan yang menekankan level analisis, yaitu negara sebagai aktor rasional dan variabel keamanannya lebih menekankan pada politik dan militer. Ini biasanya dikemukakan oleh aliran realis Seperti Walter Lippman, John Mearsheimer, Kenneth Waltz, dan Hans. J Morgenthau. Sebagaimana yang dikatakan oleh Walter Lippman bahwa Keamanan adalah:

“Suatu negara dikatakan aman apabila negara tidak berada di dalam posisi terancam untuk mengorbankan nilai-nilai utamanya (militer, politik, dan ekonomi) sebagai ketahanan nasional. Sehingga apabila ingin menghindari perang, sekalipun ditantang oleh musuh negara lain pun. Negara tentu mampu akan memenangkan perang” (Baylis et al., 2014, hal. 255)

Selain itu menurut Alex Bellany:

“Keamanan terjadi adalah suatu kondisi yang terbebas dari ancaman perang, dengan harapan tinggi bahwa konsekuensi kekalahan tidak menjadikan suatu negara sebagai hambatan sekalipun perang terjadi. Karena negara telah siap mengamankan ketahanan politik, militer, dan ekonomi negara sebagai *survival*” (Buzan, 1983).

Dari kedua definisi tersebut, bahwa keamanan tersebut cenderung ke dalam keamanan tradisional. Karena ancaman yang ditekankan adalah ancaman dari negara lain, selain itu aspek dari keamanan tradisional adalah negara sebagai unit analisis utama, dan objek keamanan antara lain politik, militer, dan ekonomi. Adapun bagi perspektif realisme bahwa keamanan akan terjadi apabila tiap-tiap negara meningkatkan *Balance of Power* baik aliansi dengan negara lain ataupun meningkatkan kapabilitas militernya sebagai *self help* negara sendiri. Keamanan Tradisional menurut Yanyan Mohamad Yani juga disebut sebagai keamanan Internasional. Sebagaimana yang ia katakan bahwa asumsi Keamanan Internasional antara lain:

1. Dalam konstelasi Politik dan Hubungan Internasional adalah berbicara hubungan interaksi antara negara dan kepentingan nasionalnya untuk *struggle for power*. Karena pada hakikatnya sistem internasional bersifat anarki;
2. Tidak ada legitimasi kekuasaan yang lebih tinggi kecuali legitimasi kekuasaan dari negara sehingga negara disebut sebagai aktor rasional;
3. Keamanan dalam kepentingannya didefinisikan secara sepihak oleh negara;
4. Stabilitas Internasional tergantung pada penekanan distribusi kekuatan yang seimbang atau disebut *Balance of power*;
5. Negara tidak berupaya untuk menggantungkan kepentingannya kepada negara lain meskipun memang negara berupaya untuk beraliansi dengan negara lain; (Banyu Perwita & Yani, 2014, hal. 126)

Maka dari itu, bahwa keamanan Internasional adalah bagaimana suatu negara meningkatkan kapabilitas militernya yang melingkupi kekuatan politik dan ekonominya, dari musuh negara lain akibat dari sistem internasional yang anarki.

Sehingga negara berusaha untuk *struggle for power* baik dengan aliansi negara lain sebagai upaya *balance of power*. Seperti Taiwan di era Tsai Ing Wen yang dihadapinya adalah potensi ancaman dari dominasi China yang semakin menunjukkan eksistensi *powernya* di era XI Jinping, yaitu *Blue Water Navynya*. Taiwan yang merasa terancam pada keamanan nasionalnya adalah karena menurut Menteri Pertahanan Taiwan, Chiu Kuo-Cheng bahwa China berpeluang untuk menggunakan kekuatan militer sebagai upaya invasi Taiwan antara tahun 2025-2027, hal itu jelas dari China sendiri bahwa upaya Reunifikasi Taiwan akan terjadi secara damai dalam waktu dekat walaupun harus menggunakan paksaan untuk memasukan kembali Taiwan pada pangkuan China, hal itu menurut Xi Jinping adalah untuk merealisasikan *The Great Rejuvenation of Chinese Nations* sebagai bagian dari *Chinese Dream* (Puspaningrum, 2022; Sorongan, 2022a).

Di era Tsai Ing Wen, *Self defense* adalah salah satu upaya Taiwan dalam mempertahankan kedaulatan nasional Taiwan, yaitu peningkatan kekuatan armada laut. Berbicara mengenai kedaulatan nasional adalah Tindakan yang dilakukan oleh negara dalam melindungi wilayah negaranya dari ancaman musuh lain baik di luar ataupun di dalam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Jean Bodin bahwa kedaulatan negara adalah kekuasaan tertinggi dengan negara sebagai pemegang kuasa kepada rakyat yang melindungi wilayahnya berdasarkan hukum yang berlaku di suatu negara (Andrew, 2011, hal. 89). Hal itu sejalan dengan perspektif neo-realisme bahwa negara mengklaim kedaulatan yang dimana negara adalah aktor rasional, sehingga tidak ada aktor lain yang terlegitimasi selain negara. Mengamankan negara berarti mempertahankan kedaulatan nasional suatu negara dengan menggunakan kapabilitas militer sebagai aspek keamanan negara (Yani et al., 2017, hal. 5).

2.3.2 Politik Luar Negeri

Politik Luar Negeri yang merupakan kajian *core subject* HI adalah menjelaskan tindakan atau upaya yang dilakukan oleh suatu negara yang dibentuk dari sumber baik sumber sistemik (eksternal) dan atau sumber masyarakat, pemerintahan, dan idiosinkretik (internal) dalam melakukan interaksi terhadap sistem internasional dan negara bangsa (internal). Akan tetapi dalam penentu Polugri yang menghasilkan namanya kebijakan luar negeri yang memiliki perbedaan dalam sumbernya, ada para ahli HI yang menitikberatkan pentingnya sumber eksternal ada juga yang menitikberatkan pada internal bahkan dua-duanya (internal-eksternal) sebagai sumber polugri. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yanyan Muhammad Yani bahwa Politik Luar Negeri adalah:

“Suatu perangkat yang dirumuskan melalui formula, nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan untuk kepentingan nasional di dalam percaturan dunia Internasional. Suatu komitmen yang pada dasarnya adalah upaya strategi secara dasar untuk mencapai suatu tujuan yaitu kepentingan nasional, baik dalam konteks dalam negeri dan luar negeri serta sekaligus menjadi suatu penentuan dalam keterlibatan suatu negara di dalam isu-isu internasional atau lingkungan sekitarnya” (Banyu Perwita & Yani, 2014, hal. 47)

Adapun definisi lain dari Polugri adalah sebagai salah satu landasan sebagai pedoman atau cara awal dalam melakukan kebijakan yang tentu dalam bidang politik dan keamanan yang dimana merupakan salah satu basis *Core interest* yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh suatu negara dalam melakukan hubungan dengan negara lain maupun aktor non-negara terutama dalam forum multilateralisme yang dilakukan oleh Organisasi Internasional, baik *International Governmental Organization* (IGO) atau *International Non-Governmental Organization* (INGO). Polugri atau disebut juga Kebijakan Luar Negeri mencakup pada proses perencanaan, pengejawantahan, serta strategi-

strategi untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu kepentingan nasional (Ashari, 2020, hal. 205).

Pada hakikatnya terdapat dua terminologi antara Politik Luar Negeri atau Polugri dan Kebijakan Luar Negeri secara tekstual memiliki persamaan tetapi dalam segi penjawantahannya memiliki pengertian yang berbeda. Perbedaannya adalah Polugri lebih menekankan pada prinsip atau orientasi yang masih dalam tahapan rumusan atau proses dari para pembuat keputusan (*decision making*) atau dari factor sistemik, dalam arti masih dalam tahapan serangkaian “**seperangkat rumusan**”, Sedangkan Kebijakan Luar Negeri lebih menekankan hasil dari seperangkat rumusan yang hasilnya berbetuk “**seperangkat aturan**”. Namun beberapa literatur dari buku lain tidak menafikan perbedaan antara Politik Luar Negeri dan Kebijakan Luar Negeri. Maka dari itu, Kebijakan Luar Negeri adalah strategi atau upaya yang dilakukan mealui rencana pada Tindakan yang dibuat oleh para pemangku keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau bagian dari politik internasional untuk tujuan nasional sebagai usaha yang dikendalikan suatu negara dalam arti tujuan kebijakan Luar Negeri adalah untuk mencapai kepentingan nasional (Banyu Perwita & Yani, 2014, hal. 49).

Selain itu menurut James N. Rosenau mengatakan bahwa Kebijakan Luar Negeri adalah:

Sebagai Salah satu bentuk perilaku atau aksi. Pada tingkat ini Kebijakan Luar Negeri berada dalam tingkat yang lebih empiris, yaitu berupa Langkah-langkah yang diambil secara riil oleh para pembuat keputusan yang memiliki hubungan dengan suatu kejadian serta situasi di lingkungan eksternal. Langkah-langkah tersebut dilakukan berdasarjan orientasi secara umum yang dianut serta dikembangkan berdasarkan komitmen dan sasaran yang lebih spesifik (Rosenau, 2006, hal. 16–17).

Sumber-sumber dalam Kebijakan LN sebagaimana yang dikatakan oleh Rosenau antara lain meliputi: sumber sistemik, masyarakat, pemerintahan dan ideosinkretik. *Pertama*, Sumber sistemik yang dipengaruhi dari lingkungan eksternal, yaitu sistem internasional terutama dalam asumsi realisme bahwa sifat sistem internasional bersifat anarki; *Kedua*, sumber masyarakat yang dimana Kebijakan LN dipengaruhi oleh faktor-faktor domestik dari konstruksi sosial pada masyarakat suatu negara dari nilai, norma, tradisi, dan pengalaman. Faktor konstruksi pada budaya dan sejarah membentuk opini publik, sehingga memengaruhi pada landasan kebijakan LN; *Ketiga*, sumber pemerintahan yang dimana dipengaruhi oleh suprastruktur politik, seperti partai politik, parlemen, yang menjadi para pembuatan keputusan atau *decision making*; *Terakhir*, sumber ideosikretik yang dimana menekankan pada landasan nilai-nilai kepribadian dalam seorang elit politik, dengan kata lain fokus pada kepribadian pada ciri khas pemimpin dalam menjalankan *power* negaranya pada kebijakan LN (Banyu Perwita & Yani, 2014, hal. 57–58; Rosenau, 2006, hal. 15).

Dalam perspektif realisme, Polugri adalah untuk mencapai kepentingan nasionalnya yaitu *power* yang dilakukan dengan cara *self help* sebagai *struggle for power*, baik untuk memperbesar pengaruh atau *power*, sebagaimana yang dikatakan oleh realisme ofensif, John Mearsheimer bahwa negara berupaya untuk meningkatkan kapabilitas *power* terutama dalam militernya bukan semata-mata untuk *power* saja, tetapi juga berupaya untuk mencapai kekuatan regional sebagai upaya keamanan. Dan realisme defensif menurutnya hanya sebatas pada peningkatan keamanan apabila ada ancaman dari negara lain (Coogan & Mearsheimer, 2001; Ph.D. Hara, 2019).

Dapat dikatakan dalam model Aktor Rasional, penekannya adalah China di bawa Xi mengedepankan rasionalitas untuk meningkatkan *powernya* melalui *leadership strategy*, dimana Chinese Dream adalah landasan kebijakan LN China dengan focus pada militer melalui *Blue Water Navy* untuk mencapai kekuatan regional berbasis angkatan laut perairan bebas disamping upaya reunifikasi Taiwan secara damai (Banyu Perwita & Yani, 2014; Ordaniel & Bradford, 2021).

Dalam pidatonya Xi mengemukakan prinsip-prinsip dalam *Chinese Dream*, yaitu 三个必须 (*san ge bixu*) yang artinya “tiga keharusan”. Ketiga prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1. 必须走中国道路 (*Bixu zou Zhongguo daolu*), yang artinya adalah harus menempuh segala cara dengan jalan China;
2. 必须弘扬中国精神 (*Bixu siyang Zhongguo jingshen*), yang artinya semangat China harus dipelihara dengan baik;
3. 必须凝聚中国力量 (*Bixu ningju Zhongguo liliang*), yang artinya kekuatan China harus dihimpun oleh persatuan rakyat yang kuat (Nufus, 2014, hal. 48).

Xi Jinping mengemukakan pemikiran tersebut karena untuk membangkitkan kembali kejayaan China seperti era dinasti terdahulu dan “abad penghinaan” dari bangsa lain yang telah membuat China dihina martabat negaranya dan menjadi negara terbelakang².

2.3.3 Kepentingan Nasional

Dalam upaya negara untuk mencapai Politik Luar Negerinya, disebut sebagai Tujuan Politik Luar Negeri. Tujuannya adalah untuk mencapai kepentingan

² Dalam Bahasa Inggris disebut sebagai “*The Century of Humiliation*”, yang terjadi pasca kekalahan Dinasti Qing (1636-1912) dalam Perang Candu di mana awal kolonialisme barat yang menjadi pemicu keruntuhan kekaisaran China hingga pada Perang Sino-Jepang kedua (1937-1945) sekaligus menandakan kemenangan China atas Jepang dalam Perang Dunia II (1939-1945).

nasional. Kepentingan nasional secara definisi dasar adalah salah satu tujuan atau upaya yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai *power*, baik secara ekonomi, militer, dan politik (Ashari, 2020, hal. 336). Selain itu, menurut Jack C. Plano dan Olton Roy yang dikutip oleh Yanyan Muhammad Yani dalam buku “Pengantar Ilmu Hubungan Internasional”

Tujuan fundamental atau secara menyeluruh dan sekaligus merupakan faktor penentu terakhir yang mengarahkan kepada para pembuat keputusan dari suatu negara dalam upaya perumusan pada kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional dalam suatu negara, tentu merupakan satu kesatuan pada aspek-aspek yang membentuk kebutuhan negara yang paling utama, antara lain meliputi pertahanan, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi (Banyu Perwita & Yani, 2014, hal. 35; Plano & Olton, 1988, hal. 11).

Maka dari itu, kepentingan nasional secara singkatnya adalah tujuan atau *goals* yang dicapai oleh suatu negara, dan cara mencapainya adalah dengan merumuskannya melalui Polugri. Berbicara kepentingan nasional tidak terlepas dari perspektif HI. Penulis mengambil salah satu perspektif realis dalam skripsi ini, realisme dalam kepentingan nasional, tentu mengejar *power* sebagai salah satu tujuan terakhir yang dilakukan oleh negara. Realisme yang mengedepankan rasionalisme bahwa negara adalah aktor rasional, melihat bahwa kepentingan utama yang dilakukan oleh negara adalah harus mempertahankan eksistensi negaranya atau *survival* karena sistem internasional yang anarki. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nicolo Machiavelli bahwa negara sebagaimana halnya dengan manusia yang sifatnya saling membunuh satu sama lain, karena egoistik (Kauppi & Viotti, 2020). Begitu juga dengan negara, karena rasa takutnya agar tidak tereliminasi oleh sistem internasional yang anarki. Maka negara memaksimalkan kemampuan *powernya* untuk *Struggle for power* dan

Self help. Disini kepentingan nasional menjadi salah satu tujuan yang dilakukan negara, yaitu bertahan hidup. Dimana aspek untuk *survivenya* adalah melalui kapabilitas militer dan ekonomi sebagai unsur utama eksistensi pada *power* suatu neagra (Roach, 2007, hal. 217).

Seperti halnya China di masa Xi Jinping untuk mencapai kepentingan nasional China yaitu, *The Great Rejuvenations of Chinese Nations* untuk menjadi negara dengan kekuatan maritim regional di Asia Pasifik dalam bidang militer, Xi berupaya meningkatkan kemampuan *military powernya* dengan mereformasi dan *military build up* pada *Blue Water Navy* sebagaimana dalam *White paper* pada strategi militer China tahun 2015. Dengan demikian kepentingan nasional China adalah untuk mencapai kekuatan regional di Asia Pasifik yang fokus pada rencana jangka panjang, yaitu Reunifikasi Taiwan sebagaimana konsep *middle kingdom* yang pernah Berjaya di masa China era dinasti, termasuk dalam bidang militer, tujuannya diejawantahkan ke dalam Chinese Dream. (Ding & Panda, 2021, hal. 277–279; The State Council Information Office of the People’s Republic of China, 2015)

2.3.4 Politik Internasional

Politik Internasional adalah ilmu yang mempelajari segala fenomena yang dilakukan oleh sebuah aktor internasional yang dimana aktornya adalah negara yang melakukan interaksi dengan aktor lain di dalam sistem internasional sebagai *boundaries* untuk menciptakan kepentingan nasional negara untuk melakukan permainan kekuasaan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Banyu Perwita dan Mochamad Yani Politik Internasional adalah proses interaksi, inter-relasi dan interplay antar aktor dalam lingkungannya yang dicirikan oleh segala bentuk usaha

negara dalam mengelola kepentingan dan kekuasaan (Banyu Perwita & Yani, 2014, hal. 39–40). Menurut K.J Holsti bahwa Politik Internasional adalah:

Studi yang mempelajari perihal pola suatu tindakan yang dilakukan oleh negara terhadap lingkungan eksternal (sistem internasional) sebagai reaksi atau respons negara lain. Selain mencakup pada konsep *power*, kepentingan, dan tindakan, Politik Internasional juga mencakup pada fokus untuk menekankan pada sistem internasional, yakni seperti *deterrence*, dan perilaku para pembuat keputusan dalam situasi yang sedang konfliktual. Dengan demikian, Politik Internasional dapat disimpulkan sebagai hubungan dua arah yang menggambarkan reaksi negara B dari aksi negara A (Holsti & Juanda, 1987, hal. 26)

Perlu diketahui bahwa secara akademik Politik Internasional memengkaji Politik Luar Negeri, dimana Polugri merupakan bagian dari Politik Internasional. Secara praktis Politik Internaisonal merupakan respons dari Politik Luar Negeri. Maka dari itu, Politik Internasional merupakan hasil reaksi yang ditimbulkan oleh suatu negara dalam Kebijakan Luar Negeri terhadap negara lain. Reaksi atau respons yang ditimbulkan oleh neagra lain bisa berupa Kerjasama atau Konflik. Reaksi yang ditimbulkan oleh neagra disebut dengan interaksi. Interaksi yang dilakukan oleh negara dibagi menjadi dua, antara lain hubungan yang bersifat simetris yang dimana ada dua variabel antara **negara A** terhadap **negara B** dan **direspons** oleh **negara B** kepada **negara A**. Selain itu hubungan asimetris yang dimana interaksi kedua negara dipengaruhi oleh faktor lain yaitu adanya lebih dari dua neagra yang mendorong negara A terhadap negara B yang direspons kembali oleh negara B ke neagra A (Banyu Perwita & Yani, 2014, hal. 42–43).

Selanjutnya, penjabaran dari Andrew Heywood dalam literatur bukunya “*Global Politics*” Model dalam Politik Internasional dibagi menjadi dua, antara lain *Billiard Model* dan *Cobweb Model*. Akan tetapi penulis memfokuskan pada *Billiard*

Model dalam menganalisis skripsi yang diambil. *Billiard model* adalah model yang dimana negara seperti halnya bola billiard yang saling berbenturan satu sama lain, artinya ketiga negara berupaya meningkatkan kepentingan nasionalnya melalui Kebijakan Luar Negeri, dengan membentur bola billiard ke bola billiard lain, maka bentuk interaksi negara memiliki perspepsi yang berbeda-beda. Sehingga sifatnya hanya sebatas perang dan damai saja. Asumsi-asumsi *Billiard model* antara lain

1. Negara memiliki kedaulatan, entitas otonom atau independent yang dimana negara dapat berdiri sendiri tanpa adanya campur tangan dari negara lain.
2. Mereka ada di dalam satu sistem dan akan saling berbenturan seperti halnya bola biliar, dimana negara selalu berupaya untuk saling mendominasi satu sama lain dengan saling meningkatkan *sphere of influence* satu sama lain.
3. Benturan dalam Bola tersebut seperti halnya dalam permasalahan politik dan Keamanan internasional suatu negara yang menjadi salah satu *concern* negara diasumsikan hanya untuk mempertahankan *power* atau *survival*.
4. Dari model tersebut ke dalam studi Politik Internasional, berfokus pada variabel perang atau damai. Interaksi antar aktor terutama negara sebagai actor rasional hanya dipahami atau dapat dianalisis dengan diplomasi dan penggunaan kekuatan militer
5. Selain itu, model analogi pada ukuran bola billiard tidak sama dengan lain, yang memiliki daya hantuk yang berbeda. Seperti halnya bola billiard. Negara ada yang memiliki *big*, *middle*, atau *small power* (Heywood, 2011).

Seperti halnya tujuan pada kepentingan nasional China dalam Implementasi kebijakan Luar Negerinya melalui *Blue Water Navy*, *Military buildup* yang dibangun oleh China dibawah Xi Jinping pada pemikiran *Chinese Dreamnya* dengan menjadi negara yang menjadi kekuatan regional di Asia Pasifik dengan mementingkan harmoni dan perdamaian serta anti hegemonisme, termasuk agenda Reunifikasi Taiwan. (Ripley et al., 2021; Zhang, 2021). Hal itu karena Tindakan China tersebut merupakan aksi dalam Polugri China yang dimana motif yang

diharapkan oleh China untuk harmoni dan perdamaian pada kawasan sekitarnya termasuk Taiwan, tetapi tindakannya cenderung menunjukkan dominasi melalui kekuatan militer yang cenderung asertif sehingga meningkatkan *security dilemma* terhadap keamanan nasional Taiwan. Oleh karena itu, respons Politik Internasional pada Taiwan adalah konflik dengan *deterrence* yang dilakukan oleh Taiwan seperti *self-defense* dengan peningkatan armada kapal laut dan induk Taiwan dan peningkatan keamanan udara pada ADIZ Taiwan dan *balance of power* dengan aliansi dengan Amerika Serikat (Cole, 2020; Ding & Panda, 2021, hal. 280; Franz-Stevan Gady, 2018).

Berdasarkan model *Billiard model*, ibaratkan China adalah bola besar yang dihentak oleh pemainnya yaitu Xi Jinping, daya hentaknya adalah antara lain dominasi China pada Kawasan Asia Pasifik dengan peningkatan armada militer pada PLAN China seperti kapal induk *Liaoning* dan pesawat jet j-16 dan j-10 ke Taiwan. Hentakan bola billiard China sebagai *bigpower* di Kawasan Asia Pasifik menimbulkan konflik terhadap Taiwan sebagai bola billiard yang kecil. Dengan responsnya adalah dengan *deterrence* melalui peningkatan armada laut Taiwan dan upaya *balance of power* dengan Amerika Serikat.

2.3.5 Geopolitik

Geopolitik adalah konsep yang menjelaskan hubungan antara kepentingan politik suatu negara dalam melakukan Kebijakan Luar Negerinya ditentukan berdasarkan keadaan geografis suatu negara masing-masing. Dengan kata lain geopolitik secara singkat adalah sebuah konsep yang menjelaskan pengaruh kebijakan politik yang ditentukan berdasarkan sisi geografis suatu negara.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Saul Bernard Cohen dalam bukunya *“Geopolitics: The Geography of International Relations*, geopolitik adalah

Sebagai analisis dalam melihat suatu interaksi antara, di satu sisi, keadaan suatu geografis dan perspektif, dan di sisi lain, proses-proses politik. Keadaan tersendiri yang memiliki ciri-ciri dan pola geografis serta wilayah yang berlapis yang dibentuknya melalui pada proses politik. Proses politik termasuk ke dalam kekuatan yang beroperasi pada tingkat internasional dan pada kancan domestik yang memengaruhi perilaku internasional. Keduanya memiliki keadaan geografis dan memiliki proses politik yang bersifat dinamis dan saling memengaruhi (Cohen, 2015).

Dengan kata lain, geopolitik menurut Cohen adalah melihat dari pola konstruksi yang dibentuk dari keadaan geografis di suatu negara baik dalam pola demografis, sosiologis, dan antropologis yang dinamis. Sehingga menjadi suatu ciri-ciri tersendiri untuk membuat proses sistem politik suatu negara melalui Politik Luar Negeri. Selain itu menurut Khasan Ashari menjelaskan Geopolitik sebagai:

Studi yang mempelajari pengaruh faktor-faktor geografis terhadap pola suatu perilaku dan tindakan negara dalam melakukan kebijakan sesuatu pada politiknya. Geopolitik juga mempelajari hubungannya pada letak geografis, iklim, sumber daya alam, populasi, serta kondisi alam yang memengaruhi pilihan-pilihan suatu negara dalam menentukan kebijakan Luar Negeri suatu negara dengan posisi negara tersebut dalam Sistem Internasional (Ashari, 2020, hal. 215–216).

Maka dari itu, geopolitik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kepentingan nasional suatu negara, dimana geopolitik merupakan unsur dalam pembuatan Politik Luar Negeri suatu negara, dimana dilakukan dengan kepentingan geostrategis. Geostrategis adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh suatu negara dalam menentukan kebijakan politik yang strategis berdasarkan keadaan situasi geografis yang terjadi pada ruang lingkup suatu wilayah. Berbicara geostrategis tidak terlepas dari pengaruh pemikiran-pemikiran dari geopolitik. Meskipun pada

awal perkembangan disiplin ilmu geopolitik adalah semata-seamata untuk kepentingan suatu negara yang cenderung bersifat ekspansionis dan imperialis dengan menggunakan kekuatan militer sebagai variabel rasional. Landasan pemikiran geopolitik di masa awal tersebut cenderung digunakan untuk kepentingan Negara lain, seperti kasus politik *Lebensraum* oleh Nazi Jerman (Flint, 2006; Priyono & Yusgiantoro, 2017).

Meskipun skeptisme geopolitik perkembangan awal cenderung imperialis, namun masih banyak penulis yang menggunakan konsep geopolitik pada perkembangan awal, contoh konsep *sea power* yang dikembangkan oleh Alfred Thayer Mahan yang menjelaskan laut menjadi indikator variabel dalam *power* suatu negara dalam *sphere of influencenya* melalui kekuatan maritim. Asumsi *Sea Power* menurut Mahan adalah :

“Barang siapa yang dapat menguasai lautan, maka perdagangan akan dapat dikuasai, selain itu dalam menguasai perdagangan oleh siapa pun, maka akan dapat menguasai kekayaan dunia sebab sumber daya alam banyak terkandung di dasar laut, sehingga pembangunan armada laut harus dibangun untuk sebagai alat keamanan dalam menjaga jalur perdagangan ekonomi pada lautan. Dengan kata lain kekuatan militer sebagai kekuatan koersif dalam memukul musuh apabila mengganggu jalur perdagangan” (Mahan, 1987)

Penjabaran Mahan dalam melihat kekuatan maritim menjadi salah satu peluang dalam upaya suatu negara dalam mencapai kepnetingan nasional pada *powernya* melalui ekonomi dan militer. Sehingga ekonomi dan militer dari asumsi Mahan merupakan variabel atau elemen yang tidak dapat dipisahkan. Sebagaimana di masa Xi Jinping dengan Kebijakan LNnya *Chinese Dream* pada *Blue Water Navy*, yaitu untuk mencapai kejayaan Kembali seperti era dinasti dahulu. Selanjutnya, dalam motif China sendiri di bawah rezim Xi Jinping, Xi berupaya menjalankan *chinese*

dream pada *military buil up* PLANnya berdasarkan pada prinsip Mahanian dari tiga variabel China (Ekonomi, militer, dan Politik). Konsep mahanian menjadi salah satu para ahli geopolitik dan geostrategis China kontemporer yang menggambarkan keselarasan dalam upaya China dalam kebangkitan damai melalui *military build up* PLAN pada *blue Water Navynya* terutama upaya Xi Jinping dalam mencapai *maritim power* secara regional di Asia Pasifik (Chan, 2021, hal. 159–161; Mahan, 1987, hal. 26–28; Yoshihara & Holmes, 2018)

Tiga aspek tersebut merupakan bagian dari upaya *military power*, dimana China dalam penekanan militernya lebih mengedepankan pada prinsip, *sea power* yang menurut China lebih rasional, hal itu disebabkan karena China berupaya untuk menjaga kepentingan jalur ekonomi maritimnya, *string of pearl (ekonomi)*, mencegah negara lain terutama kepentingan AS di dalam Kawasan Taiwan yang menurut China, akan merongrong untuk separatisme Taiwan untuk merdeka ‘secara eksternal’ dan *military build up (militer)*. Sehingga *military build up* PLAN China dengan masuknya ke teritori Taiwan salah satunya Selat Taiwan dan ADIZ Taiwan sebagai legitimasi bahwa China memang serius dalam upaya reunifikasi Taiwan (**politik**) (Ding & Panda, 2021, hal. 278; Manhas, 2020; Yoshihara & Holmes, 2018).

Selain itu, *military buildup* yang dibangun oleh China dalam *Blue Water Navynya*, perlu diketahui bahwa secara harfiah *Blue Water Navy* adalah upaya peningkatan *power* yang dilakukan oleh suatu negara dalam mencapai perairan bebas atau Samudra biru. Sebagaimana dalam Geoffrey Till dan Patrick C. Barton dalam bukunya yang berjudul “*Sea Power and Asia-Pacific: The Triumph of Neptune?*” bahwa *Blue Water navy* adalah

“Angkatan laut biru yang dimana kemampuan kekuatan militernya telah mencapai atau melampaui perairan dalam (samudera), setelah mencapai perairan laut coklat yang melintasi dalam penjagaannya di wilayah pesisir (laut teritori) dan perairan laut hijau di wilayah laut regional. Sehingga kemampuan Angkatan laut biru adalah sebuah Langkah yang dilakukan oleh suatu negara dalam kapabilitas militernya untuk mencapai *seapowernya* secara global” (Till & Bratton, 2012, hal. 150).

Dalam tingkatan hirarki sebuah negara dalam pencapaian *Blue Water Navy*, Kirchberger mengklasifikasikan sistem tingkatan negara dalam kemampuan *Blue Water Navy* ke dalam sebuah tabel yang dikutip dari Daniel Todd dan Michael Linberg seperti di bawah ini:

	Ranking	Proyeksi	Kemampuan militer	Angkatan Laut yang dimiliki oleh negara
<i>Blue Water Navy</i>	1	Mengarah pada upaya mencapai <i>Global Power</i>	Memaksimalkan <i>power</i> secara global yang berkesinambungan	Amerika Serikat
	2	Mengarah pada <i>Global Power</i> secara terbatas	Sedikitnya ada satu pasukan yang dapat melakukan operasi pertahanan laut secara global dengan jumlah yang terbatas	Perancis dan Inggris
	3	Mengarah pada <i>multiregional power</i>	Memaksimalkan <i>power</i> pada antar Kawasan yang berdekatan dengan negaranya	India, Italia, Rusia, Spanyol, dan Brazil
	4	Mengarah pada <i>regional power</i>	Memaksimalkan pada <i>power</i> secara terbatas diluar ZEE	China, Jepang, Australia, Korea Selatan, dan Jerman

Tabel 2.3.5: Hirarki per negara dalam jangkauan *Blue water Navy* (data terbaru tahun 2015) sumber: (Kirchberger, 2015, hal. 60; Michael, 1996)

Dari motif kepentingan nasional China tersebut, upaya China dalam kebijakannya diharapkan dengan cara damai dan anti hegemonisme, namun kenyataanya China menunjukan dominasi *powernya*, disini penulis menjelaskan definisi dari dominasi. Dominasi adalah suatu perilaku yang dilakukan oleh aktor

internasional, salah satunya negara yang saling meningkatkan satu sama lain dalam *power*nya di dalam sistem internasional. Sebagaimana yang dikatakan oleh Christopher McCammon dalam Bukunya "*Domination*" yang diterbitkan di *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* bahwa Dominasi adalah

Sebuah kekuatan yang biasanya memiliki kekuatan sosial yang dibentuk oleh hasrat alamiah dari individu untuk menggulingi kekuasaannya dari individu lain. Biasanya dilakukan oleh agen atau sebuah institusi, institusi tersebut yaitu negara. Karena sifat negara selalu menunjukkan *power* atas negara lain. Maka pola hubungan social yang dibentuk oleh negara adalah Negara A akan mendominasi negara B dan begitu sebaliknya, negara B akan saling mendominasi negara A (diparafrasekan oleh penulis McCammon, 2018).

Pola yang dilakukan oleh negara yang merupakan bagian dari entitas dari agen (kelompok), selain dari individu, Dengan kata lain, bahwa negara memiliki sifat saling membunuh satu sama lain, dalam paradigma realisme HI, disebut sebagai *Homo homini lupus* yang dikatakan oleh Thomas Hobbes dalam bukunya, *Leviatan*. Artinya bahwa sifat dari negara seperti halnya serigala yang saling membunuh maka, hukum lingkungan yang dibentuk adalah *human nature* (Kauppi & Viotti, 2020, Bab 1). Maka landasan dominasi juga masuk ke dalam Perspektif Realisme. Realisme melihat dominasi merupakan bagian dari sifat negara yang dibentuk karena sifat egoistik dan sistem internasional yang anarki. Sehingga sifat dari sistem internasional adalah *realpolitik* yaitu tidak memandang etika kenengaraan dalam melakukan interaksi di dalam Hubungan internasional. Artinya kekuatan *hard power* lebih didepankan, yaitu menggunakan aspek militer (Heywood, 2011, Bab 1).

Maka dari itu, menurut Hans J. Morgenthau bahwa hakikat dari negara adalah bersifat egoistik dan sistem internasional bersifat *zero sum games*. Meskipun

memang beberapa pakar realisme seperti Kenneth Waltz yang mengkritik Morgenthau bahwa sifat negara tidak hanya dari dalam tapi dari luar (sistem internasional) dan *power* negara digunakan untuk keamanan. Selanjutnya, John Mearsheimer juga mengkritik Waltz bahwa negara juga berupaya untuk menghegemoni tetapi secara rasional hanya dilakukan di Kawasan terdekat. Sehingga disebut hegemoni regional. Hegemoni tersebut menurut Mearsheimer akan stabil apabila bipolar, yaitu negara saling mendominasi negara lain. Sehingga akan terjadi *arm race*.

Dalam 2019 *White Paper Military Defence Strategy* bahwa upaya kebangkitan China sebatas untuk mengamankan kedaulatan wilayah terutama pada jalur maritimnya, disini konsep Mahan dalam *sea power* adalah sebagai salah satu pengupayaan China untuk keamanan wilayah dengan militer sebagai alat untuk menjaga string of pearls, dan sebagai salah satu kekuatan koersif China pada *Blue Water Navy* untuk menjangkau perairan bebas yang memiliki motif untuk reunifikasi Taiwan, di sisi eksternal dari ancaman dominasi negara lain terutama AS yang memiliki kepentingan geopolitiknya di Taiwan yang menjadi kekhawatiran untuk mendorong separatisme Taiwan, menjadi sebab mengapa China sering masuk ke wilayah Taiwan terutama zona laut, selat Taiwan, dan zona udara ADIZ Taiwan.

2.3.6 Security Dilemma

Security Dilemma adalah suatu kondisi di mana suatu negara meningkatkan keamanan kapabilitas *military power* termasuk peningkatan senjata, namun mengakibatkan ancaman bagi negara lain. Sehingga negara lain juga berupaya untuk meningkatkan keamanan dengan melakukan peningkatan *military power*. Secara historis landasan konsep atau ruh *security dilemma* pertama kali dikembangkan oleh

John Herz dalam bukunya "*Political Realism and Political Idealism*". *Security Dilemma* adalah:

Keadaan sosial di mana kekuatan individu yaitu negara memiliki otoritas di atasnya untuk menegakkan norma-norma perilaku atau untuk mencegah mereka menyerang satu sama lain. Karena tidak adanya otoritas internasional yang mengatur sistem internasional. Sehingga rasa saling curiga dan takut mendorong masing-masing negara untuk mendapatkan keamanan lebih dengan meningkatkan *powernya*, salah satunya adalah kekuatan militer (Sabine & Herz, 1952, hal. 157).

Selain itu, menurut John Mearsheimer yang merupakan pakar HI aliran realis juga mengutip dari pendapat John Herz, ia mengatakan bahwa *Security dilemma* adalah:

"Usaha yang dilakukan oleh negara dengan berjuang untuk mencapai keamanan dari ... serangan lain yang dilakukan oleh musuh negara lain. Negara didorong untuk semakin meningkatkan *powernya* agar terhindar dari dampak *power* negara lain yang dapat mengancam kepentingan nasional. Sehingga, membuat yang lain merasa tidak aman dan memaksa mereka untuk mempersiapkan yang terburuk dengan peningkatan kekuatan militer. Karena semakin banyak negara yang meningkatkan keamanannya dalam sistem internasional yang anarki, maka pola siklus antara negara satu dengan negara lain akan meningkatkan keamanan negaranya." (Coogan & Mearsheimer, 2001, hal. 43)

Maka dari itu, *Security dilemma* adalah suatu kondisi dimana sistem internasional yang anarki dan sifat negara yang egois mendorong negara untuk meningkatkan keamanannya, namun mengancam terhadap negara lain, sehingga negara lain juga ikut meningkatkan keamanannya salah satunya melalui peningkatan kapabilitas militer. Perspektif Realisme dibagi dalam dua aliran. Aliran Realisme Klasik melihat bahwa *security dilemma* dapat diakhiri dengan *self help* suatu negara dengan meningkatkan kemampuan militernya, sedangkan aliran neo-realisme melihat bahwa *security dilemma* bersifat abadi sehingga *Balance of Power*

akan terus terjadi yang menyebabkan terjadinya bipolarisme yang mendorong terjadinya *arm race* (Ph.D. Hara, 2019; Yani et al., 2017, hal. 86–87).

Dengan demikian, bahwa realisme melihat *security dilemma* bersifat alamiah di dalam sistem internasional, negara A akan meningkatkan kemampuan militernya mengakibatkan menurunkan keamanan negara B yang menganggap sebagai ancaman. Sehingga negara B akan meningkatkan pula keamanan militernya yang berujung pada persaingan kekuatan militer (Yani et al., 2017, hal. 87). Berbicara *security dilemma* juga berbicara bagaimana suatu negara meningkatkan keamanan nasionalnya. Keamanan nasional menurut Khasan Ashari adalah

Konsep Keamanan yang sering diartikan sebagai ketidakadaan suatu ancaman yang memengaruhi pada nilai-nilai yang bersifat utama (*major values*) suatu negara. Yang artinya negara merasa aman dalam aspek yang meliputi integritas teritorial, kedaulatan, populasi, dan kesejahteraan rakyat dari ancaman-ancaman musuh lain terutama negara lain yang mengakibatkan kehancuran atau kerusakan. (Ashari, 2020, hal. 337).

Dari Tindakan China tersebut, menjadi ancaman bagi masalah keamanan nasional Taiwan, di masa Tsai Ing wen yang notabene org yang pro-merdeka dari partai DPP, di mana China mengancam Taiwan akan menggunakan kekuatan paksa melalui militernya jika ada intervensi asing masuk dalam urusan reunifikasi Taiwan. Sejalan dengan Menteri Pertahanan Taiwan, Chiu Kuo-Cheng bahwa China terindikasi akan melakukan invasi, Selain itu dari China sendiri China bisa kapan saja menggunakan kekuatan paksa melalui militer jika Taiwan terus melakukan provokasi untuk merdeka dari China atas turut campurnya pihak asing (Jain, 2021; Sorongan, 2022a). Dengan demikian, *security dilemma* terhadap Taiwan akibat karena tindakannya untuk melakukan invasi Taiwan alih-alih melakukan dengan cara damai, menyebabkan *Cross Strait Relations* semakin memburuk. Sehingga

Taiwan melakukan keamanan Nasionalnya, *Self defense* dengan peningkatan keamanan militernya dan *balance of Power* dengan Amerika Serikat dengan Kerjasama Latihan militer dan pertahanan untuk membendung ancaman dari China dan juga sebagai Langkah dari deterrensi yang dilakukan oleh Taiwan yang didukung oleh AS (Blanchard, 2020; Feng, 2020)

2.3.7 Deterrence

Deterrence secara terminologi adalah penangkal atau pencegahan. Deterrence adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh negara untuk mengamankan dirinya dengan kekuatan militer sebagai salah satu kekuatan nasional untuk mencegah ancaman dari luar dan menimbulkan rasa ketakutan dan gertakan kepada negara lainnya. *Deterrence* berkembang pada masa perang dingin dan pendekatan tersebut digunakan dalam penggunaan senjata nuklir dan berkaitan dalam *War on Terrorism* dan hal itu dimuat dalam Robert Jervis, dalam teori tersebut aktor terutama negara berupaya dalam peningkatan kekuatan dan kelebihan militernya untuk menangkal serangan lawan, atau setidaknya menekan dan memaksa lawan untuk berpikir kembali untuk melakukan serangan . Tujuan dari deterrence agar negara lain yang dianggap sebagai ancaman dan tahu dan mengurungkan diri untuk melakukan penyerangan dan menghasilkan gertakan (Baylis, 2002, hal. 161–170). Selain itu, Sebagaimana juga yang dikatakan oleh John Herz dalam jurnal yang berjudul “*Deterrence and International Conflict: Empirical Findings and Theoretical Debates*”, bahwa *Deterrence* adalah tindakan sebuah ancaman yang dilakukan oleh suatu negara sebagai kepatuhan dalam upaya gertakan untuk mencegah dari ancaman negara lain. Dapat dikatakan *Deterrence* adalah upaya

penggunaan kekuatan militer sebagai alat pukul agar negara lain tidak macam-macam terhadap keamanan nasional suatu negara (Huth, 1999, hal. 26).

Meskipun *Deterrence* pada hakikatnya adalah bagian dari upaya *Arm race*, salah satunya persaingan kekuatan militer pada nuklir, namun penulis menekankan pada variabelnya, yaitu “*military power*”. *Deterrence* juga merupakan bagian dari sub-konsep dari konsep diplomasi koersif yang menekankan kekuatan pemaksaan dengan penggunaan *carrot and stick policy* sebagai ancaman yang dilakukan oleh negara kepada musuh (Williams, 2008, hal. 216–217). Thomas Schelling menfinisikan *deterrence* sebagai bagian dari diplomasi koersif dan mengklasifikasikan antara *deterrence* (pencegahan) dan *compellence* (pemaksaan). Perbedaannya menurut Schelling, *deterrence* adalah upaya mengamankan keamanan nasionalnya dan memaksa musuh untuk tidak melakukan sesuatu. Sedangkan *Compellence* mencegah sekaligus memaksa musuh untuk melakukan suatu agar tidak mengancam terhadap keamanan nasional negara (Constantinou et al., 2016, hal. 478; Schelling, 1967, hal. 69–71; Williams, 2008, hal. 218). Maka dari itu, *deterrence* dan *compellence* merupakan bagian dari sub-konsep dari diplomasi koersif

Sebagaimana pengaruh dari dominasi China akibat masuknya kapal induk PLAN China dan pesawat jet j-16 dan j-10 ke ADIZ Taiwan sebagai Langkah implementasi dari *Chinese Dream*, menyebabkan security dilemma pada keamanan nasional Taiwan meningkat, sehingga menyebabkan Cross Strait Relations semakin memburuk, hal itu ditandai dengan peningkatan keamanan nasional Taiwan dengan deterensinya melalui peningkatan kekuatan militer Taiwan dan upaya aliansi dengan AS dalam kerjasama pertahanan melalui Taiwan Deterrence Act (Blanchard, 2020;

Radio Free Asia, 2022; Taiwan Deterrence Act, 2021) Sehingga harapan Chinese Dream yang dilakuakn oleh China dengan pendekatan harmoni dan perdamaian dinilai bagi Taiwan sebagai ancaman pada keamanan nasional dan Kawasan Asia Pasifik bagi AS.(Cole, 2020; The Ministry of Defense of Republic China (Taiwan), 2021b, hal. 33) . Bukan hanya itu saja, Tsai mengeluarkan doktrin pertahanan baru yaitu “*resolute defense, multi domain deterrence*”

Selain itu doktrin pertahanan yang dilakukan oleh AS kepada Taiwan sebagai mitra sekutu pertahanan di Asia Pasifik, adalah berdasarkan Undang-undang Pertahanan Deterensi Taiwan yang isinya adlah strategi dan dukungan AS terhadap Taiwan dalam melindungi Taiwan dari ancaman China, isinya antara lain bantuan ekonomi pada alutsista Taiwan melalui belanja militernya, dan Kerjasama Latihan militer AS. Berbicara dokrrin pertahanan secara definisi menurut RAND Corporation bahwa seperangkat prinsip dasar yang memandu pasukan militer saat mereka mengejar tujuan keamanan nasional (RAND, n.d.). Selanjutnya, menurut Khasan Ashari yang lebih menggunakan kata “doktrin” saja karena menurutnya doktrin telah mencakup aspek keamanan negara, yatu militer. Definisi Doktrin menurutnya adalah pedoman yang digunakan sebagai dasar kebijakan oleh negara *Big power*, secara umum berhubungan dengan penetapan suatu kriteria atau indikator yang membolehkan penggunaan kekuatan militer dalam mengamankan negara (Ashari, 2020, hal. 171)

Dengan demikian dari kerangka teoritis yang penulis ambil, maka disimpulkan melalui asumsi-asumsi dasar sebagai Hipotesis. Asumsi-asumsi tersebut antara lain: dasar :

- 1) Implementasi Kebijakan Luar Negeri China di bawah Xi Jinping melalui pemikiran *Chinese Dream* dipengaruhi oleh ideosinkretis Xi Jinping yang lebih pragmatis, dimana Xi menitikberatkan kebijakan pemerintahannya langsung diterapkan secara empiris bukan semata-mata normatif, melainkan harus dirasionalisasikan ke dalam kepentingan nasional China yaitu mencapai kekuatan regional berbasis *maritime power* di Asia Pasifik.
- 2) Landasan pemikiran tersebut menjadi *Rational Actor Model* bagi China untuk mencapai kekuatan regional di Asia Pasifik dengan fokus pada upaya *sea power* yang dilakukan oleh China dalam meningkatkan *Blue Water navy* yang lebih asertif. Di bawah Rezim Xi Jinping, pengejawantahan *Blue Water navy* cenderung lebih aktif dan menonjolkan ambisi ofensivitas kekuatan China yang bertujuan untuk harmoni dan perdamaian. Di mana tujuan khusus dari upaya *sea power* pada *Blue Water Navy* (PLAN) China adalah strategi upaya reunifikasi Taiwan sebagai tujuan nasionalnya. Selain itu kepentingan pada *Blue Water Navy* adalah sebagai upaya keamanan jalur *String of pearl*. Sehingga China melalui kapal induk PLAN alih-alihnya untuk keamanan dan upaya perdamaian pada reunifikasi Taiwan dengan masuk pada teritori Taiwan, salah satunya Selat Taiwan dan *Air Defense Identification Zone* Taiwan. Artinya Kebijakan Luar Negeri China pada *Blue Water Navy* untuk upaya kepemimpinan regional di Asia pasifik dan tetangganya yaitu Taiwan (*Leadership Strategy*)
- 3) Akan tetapi, dominasi *Blue Water Navy* China yang menunjukan ofensivitasnya, menyebabkan terjadinya *security dilemma* terhadap Taiwan yang dimana sejak di bawah Tsai Ing Wen, dinamika *Cross Strait Relations*

yang tengah memburuk, hal itu semakin memperparah karena upaya yang dilakukan China menurut Tsai adalah ancaman invasi Taiwan dengan menggunakan kekuatan militer. Dimana masuknya kapal induk Liaoning dan Shandong di dalamnya terdapat pesawat jet j-16 dan j-10 masuk ke teritori Taiwan melalui Selat Taiwan dan ADIZ Taiwan, sebagai *threat* untuk mencegah Taiwan merdeka.

- 4) Dari ancaman tersebut, menyebabkan respons pada Taiwan sebagai konflik sebagaimana dalam teori Politik Internasional, berupaya untuk mencegah dominasi China pada PLANnya dengan melakukan peningkatan armada laut dan armada udara Taiwan sebagai *Self help* yang dilakukan oleh Taiwan dan Melakukan aliansi dengan Amerika Serikat sebagai deterensi dengan Kerjasama Latihan militer dan peningkatan keamanan teritori Taiwan yang dimana AS memiliki kepentingan untuk mengamankan kepentingan Kawasan militer di Asia Pasifik. Sehingga benang merahnya pada variabel bebas Poin 1 dan 2 implementasi China pada *Blue Water Navy* dari landasan *Chinese Deram* untuk upaya kepentingan kekuatan regional di Asia Pasifik termasuk agenda reunifikasi Taiwan namun direspons oleh Taiwan sebagai ancaman karena upaya *Blue Water Navy* pada PLAN sebagai kekuatan untuk upaya reunifikasi Taiwan dengan cara invasi melalui kekuatan militer dengan masuknya kapal Liaoning, Shandong, dan pesawat jet j-16 dari PLAAF dan j-10 dari PLAN ke ADIZ Taiwan. Sehingga menyebabkan *Security dilemma* terhadap Taiwan yang berujung pada meningkatnya tensi *Cross Strait Relations*.

- 5) Dengan tensi *Cross Strait Relations* yang semakin memburuk selama 40 tahun terakhir menunjukkan bahwa ancaman Taiwan adalah dominasi China yang merupakan ancaman nyata. Alasan untuk berencana menginvasi Taiwan membuat Taiwan di bawah Tsai Ing-Wen semakin mengecam Tindakan China dengan keamanan nasionalnya, membuat doktrin pertahanan yaitu “*resolute defense,, multi domain deterrence*”

2.4 Hipotesis

Berdasarkan dari asumsi yang ditulis oleh penulis. Maka hipotesis yang dibuat adalah :

“Kebijakan Luar Negeri China (Chinese Dream) pada Blue Water Navy dengan military build up PLAN menyebabkan *security dilemma* Taiwan meningkat, sehingga mengancam keamanan nasional Taiwan dan direspons oleh Taiwan dengan self defensinya melalui doktrin *resolute defense, multi domain deterrence*”

2.5 Tabel Operasionalisasi Variabel

Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
Variabel Bebas: Kebijakan Luar Negeri China (Chinese Dream) pada	1. Peningkatan kekuatan dan reformasi armada militer , salah satunya Angkatan laut PLAN(China Power Team, 2022; Ding &	1. Data (Fakta dan Angka) di Era Xi Jinping mengalami peningkatan belanja militer yang mengalami pertumbuhan yang cenderung cepat sampai tahun 2020 terakhir sekitar 209,2 Milliar Dolar AS dan

<p>Blue Water Navy dengan military build up PLAN</p>	<p>Panda, 2021; (The Ministry of Defense of Republic China (Taiwan), 2021b, hal. 38))</p> <p>2. Upaya sea power pada geopolitik China (The State Council Information Office of the People's Republic of China, 2015)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepentingan geoekonomi pada string of pearl dan SLOC (ekonomi) - upaya jangka panjang pada reunifikasi taiwan (politik) - keamanan militer china dari ancaman eksternal seperti dominasi As di asia pasifik yang berupaya 	<p>pertumbuhan dan peningkatan armada militer salah satunya Kapal Fregat dan penghancur sekitar 87 buah sumber :</p> <p>(https://chinapower.csis.org/military-spending/; https://chinapower.csis.org/china-naval-modernization/ ; (The Ministry of Defense of Republic China (Taiwan), 2021b, hal. 39))</p> <p>2. Data (Fakta) Upaya China dalam kepentingan nasional dalam <i>Chinese Dream</i> pada Blue Water Navynya didasari oleh landasan konsep <i>sea power</i> dari Alfred Thayer Mahan. Konsep sebut menjadi doktrin geopolitik China sebagai mazhab “Mahanian” yang dipakai sejak tahun 2008. Meskipun memang telah dikembangkan sejak era Deng Xiaoping. Landasan tersebut dijadikan strategi militer China dalam Kebijakan LN China melalui <i>White Military strategy paper</i> oleh</p>
---	--	--

	<p>memprovokasi Taiwan untuk merdeka (militer)</p> <p>3. Upaya mencapai kekuatan regional di Asia Pasifik</p>	<p>Dewan Negara Republik Rakyat China pada tahun 2015 Sumber: (Chan, 2021, hal. 141; The State Council Information Office of the People's Republic of China, 2015)</p> <p>3. Data (Fakta) Upaya peningkatan <i>Blue Water Navy</i> China adalah untuk mengembalikan kembali kejayaan dinasti terdahulu di mana China sebagai pusat kekuatan di Asia Pasifik <i>Middle Kingdom</i> (Bader, 2016; Cronin et al., 2017; Yuliantoro, 2020, Bab 4)</p>
<p>Variabel Terikat: <i>Security Dilemma Taiwan</i> meningkat, sehingga mengancam keamanan nasional Taiwan dan</p>	<p>1. tensi dinamika cross strait relations semakin memburuk karena semakin banyak armada militer masuk ke teritori Taiwan termasuk ADIZ Taiwan</p>	<p>2 Data (Fakta, Angka, dan Gambar) menurut data dari laporan <i>China Cross Strait Academy</i> yang dilansir dari Kementerian Pertahanan Nasional Taiwan, pada bulan September 2020 menunjukkan bahwa semakin banyaknya PLAN chiina (pesawat jet dan kapal induk lianoing) sampai 80 kali hingga tanggal 19 April 2021. Dari pengaruh tersebut menunjukkan ancaman terhadap Keamanan</p>

<p>direspons oleh Taiwan dengan self defensinya melalui doktrin <i>resolute defense, multi domain deterrence</i></p>	<p>2. Ancaman Invasi China terhadap Taiwan</p> <p>3. Strategi pertahanan Taiwan yang berbasis pada keamanan hibrida penggunaan teknologi <i>Cyberwarfare</i> dan konvensional</p> <p>4. peningkatan armada kapal laut dan udara serta aliansi dengan AS melalui latihan militer Taiwan-National-Defense-Report-2021.pdf (33)</p>	<p>Nasional Taiwan yang menyebabkan tensi dinamika <i>Cross Strait relations</i> semakin meningkat melalui grafik dan gambar yang dianalisis dari laporan tersebut</p> <p>Sumber : (China Cross-Strait Academy et al., 2021, hal. 59 dan 89; The Ministry of Defense of Republic China (Taiwan), 2021b, hal. 42 dan 61; Zheng, 2021)</p> <p>3 Data (Fakta) upaya reunifikasi Taiwan yang merupakan bagian dari <i>Chinese Dream</i> menunjukkan ancaman bagi Taiwan, yaitu dengan cara paksa sekalipun sebagaimana yang dikatakan oleh Xi Jinping dalam pidato Komite Nasional Partai Komunis China pada tahun 2019, hal itu direspons bagi Taiwan bahwa 2027 berpotensi akan melakukan upaya invasi ke Taiwan</p> <p>Sumber: (Sorongan, 2022a; Wirawan, 2021)</p> <p>4 Data (Fakta) di bawah Tsai Ing-wen strategi <i>self defense</i> yang dilakukan</p>
---	--	--

		<p>Taiwan dalam keamanan Nasionalnya berbasis pada keamanan multi domain, yaitu dengan menggabungkan kekuatan teknologi militer reformasi structural militer, dan modernisasi militer</p> <p>Sumber: (The Ministry of Defense of Republic China (Taiwan), 2021b, hal. 66–69)</p> <p>5 Data (Fakta) Taiwan meningkatkan armada militer laut dengan kapal laut Tuo Chiang yang dibuat sejak tahun 2012 dan diperbarui pada tahun 2021, dan Kerjasama Latihan militer AS dengan doktrin pertahanan <i>Taiwan Deterrence Act</i></p> <p>Sumber : (Blanchard, 2020; Radio Free Asia, 2022; Taiwan Deterrence Act, 2021)</p>
--	--	--

Selanjutnya pada skema dan alur penelitian, untuk memudahkan pembaca dalam memahami alur penelitian penulis. Maka penulis menggunakan anak panah berwarna **emas** sebagai **Variabel Bebas** dan anak panah berwarna **hitam** sebagai **Variabel Terikat**

2.6 Skema Penelitian

